

FIQH MUAMALAH TENTANG BUNGA BANK

(Studi Pemikiran Intelektual Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur)

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh
Miftahul Ulum
F0.8312014

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Miftahul Ulum

NIM : F08312014

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Maret 2018

Saya yang menyatakan,



Miftahul Ulum

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi Miftahul Ulum ini telah disetujui

Pada tanggal 5 Desember 2018

Oleh:

PROMOTOR



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.

PROMOTOR



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI

Disertasi Miftahul Ulum telah diverifikasi pada tanggal 29 Desember 2017

Tim verifikasi:

1. Prof. Dr. H. A. Faisol Haq, MAg.

2. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

3. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag

4. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA.

5. Dr. Mugiyati, MEI.

6. Dr. H. Khotib, M.Ag.

Surabaya, 4 Maret 2018

Direktur,



Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag
NIP. 195601031985031002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi Miftahul Ulum dengan judul: Fiqh Muamalah Tentang Bunga Bank (Studi Pemikiran Intelektual Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur) ini telah diuji dalam tahap pertama (tertutup) pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 dan layak untuk diuji tahap kedua.

Tim Penguji:

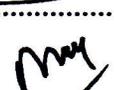
1. Dr. A. Nur Fuad, MA. (Ketua)
2. Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag. (Sekretaris)
3. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. (Promotor)
4. Dr. H. Masruhan, M.Ag. (Promotor)
5. Prof. Dr. H. Muhammad Dja'far, M.Ag. (Penguji Utama)
6. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. (Penguji)
7. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA. (Penguji)


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Surabaya, Desember 2018

Direktur,




Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 195604121994031001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

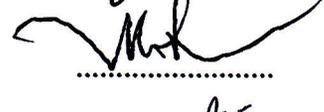
Disertasi Miftahul Ulum dengan judul: Fiqh Muamalah Tentang Bunga Bank (Studi Pemikiran Intelektual Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur) ini telah diuji dalam tahap kedua (terbuka) pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019.

Tim Penguji:

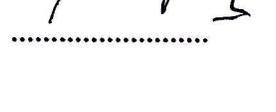
1. Dr. A. Nur Fuad, MA. (Ketua/Penguji)
2. Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag. (Sekretaris/Penguji)
3. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. (Promotor/Penguji)
4. Dr. H. Masruhan, M.Ag. (Promotor/Penguji)
5. Prof. Dr. H. Muhammad Dja'far, M.Ag. (Penguji Utama)
6. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. (Penguji)
7. Prof. Dr. H. Husein Aziz, MAg. (Penguji)


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Surabaya, Marer 2019



Direktur,


Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 195604121994031001

ABSTRAK

Miftahul Ulum. FIQH MUAMALAH TENTANG BUNGA BANK (Studi Pemikiran Intelektual NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Jawa Timur).

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif yang berusaha menggambarkan secara komprehensif dan mendalam tentang analisis fikih terhadap bunga bank atas pandangan intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur. Penentuan subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*.

Kegelisahan akademik penulis bermula pada saat mengamati kebingungan umat Islam di dunia, khususnya tentang persoalan bunga bank konvensional. Upaya pencarian solusi telah dilakukan oleh intelektual muslim, akan tetapi kebingungan tetap terjadi. Tidak ada kesepakatan di kalangan intelektual tentang definisi “bunga” selama periode awal Islam sehingga sampai saat ini. Di satu sisi, bunga penting dari sudut pandang ekonomi, di sisi lain, ada peringatan yang kuat terhadap riba dalam Al-Qur’an. Banyak orang dan bahkan intelektual muslim sepakat bahwa tanpa menemukan solusi dari masalah ini, kondisi ekonomi umat Islam dipertaruhkan.

Penelitian ini berupaya menjawab rumusan masalah antara lain: bagaimana pandangan intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur tentang bunga bank? Bagaimana metode *istinbāt* hukum tentang bunga bank menurut intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur? Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pandangan intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur?

Hasil penelitian ini adalah: *Pertama*, sebagian intelektual NU Jawa Timur menganggap bahwa bunga bank adalah mubah dengan berbagai alasan dan landasan atas konstruksi fikihnya, tetapi sebagian yang lain justru mengharamkannya selaras dengan fatwa MUI. Demikian halnya, para tokoh intelektual Muhammadiyah, mayoritas memiliki pandangan yang sama dengan persyarikatan PP Muhammadiyah yang telah mengharamkan bunga bank, namun uniknya masih ada tokoh intelektual Muhammadiyah Jawa Timur yang “tidak taat” terhadap penetapan hukum organisasinya dengan “berfatwa” bahwa bunga bank adalah mubah (halal) dengan berbagai argumentasi ilmiahnya. Beragam pendapat para tokoh intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur tentang acuan dasar hukum terkait ijtihad fikihnya atas bunga bank. *Kedua*: Para ulama yang menganggap halal bunga bank dengan argumentasi akademik bahwa bunga bank tidak dapat dipersamakan dengan riba, karena tidak ada unsur kedholiman, bersifat produktif atau sama-sama diuntungkan. Sementara para tokoh intelektual -baik NU atau Muhammadiyah- yang menganggap bunga bank adalah haram dengan alasan bahwa bunga “sama sekalipun tidak serupa” dengan riba. Secara ekonomi, bunga dapat menimbulkan inflasi ekonomi, sebagai akibat dari bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. *Ketiga*, sebagai akibat hukum yang timbul dari pandangan intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur atas “fatwa-fatwa” mereka, setidaknya telah memberikan rekomendasi serta saran-saran bijak kepada kaum akademisi dan masyarakat awam untuk dapat menerima kenyataan akan heterogenya pengetahuan serta menjadikannya perbedaan pendapat tersebut sebagai khazanah kekayaan ilmu pengetahuan, jika bimbang dengan fatwa bahwa bunga bank adalah halal, maka haramlah sebagai pilihan hukum kedua.

Penelitian ini berimplikasi pada munculnya beberapa tipologi yang berimplikasi pada terjadinya perbedaan antara pemikiran intelektual NU dengan keputusan Mukhtamar kedua NU di Surabaya pada tanggal 2 Rabi' al-Tsani 1436 H atau 9 Oktober 1927. Penelitian ini juga berimplikasi pada terjadinya perbedaan hasil musyawarah Nasional ke 27 di Universitas Muhammadiyah Malang yang menyimpulkan bahwa bunga bank adalah haram.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan disertasi ini dengan segala keterbatasannya melalui pertolongan dari berbagai pihak yang memberikan motivasi, bantuan, bimbingan, saran, dan pengarahan. Oleh karena itu, ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis persembahkan kepada:

1. Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag, MA., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
2. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag dan Dr. H. Ahmad Nur Fuad, MA., direktur dan wakil direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, atas arahan akademik, kebijaksanaan dan motivasinya kepada saya untuk segera menyelesaikan studi dan memberikan saran untuk perbaikan disertasi.
3. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, MAg dan Dr. H. Masruhan, M.Ag., sebagai promotor yang telah memberikan bimbingan selama penulisan disertasi ini. Sulit rasanya disertasi ini terselesaikan jika tanpa kesabaran beliau berdua dalam membimbing penulis, memberi semangat, dan arahan dalam penulisan disertasi. Bahkan di tengah-tengah kesibukannya, beliau masih menyempatkan berdiskusi dan memberikan banyak ilmu yang penulis belum dapatkan sebelumnya.
4. Seluruh dosen yang telah berbagi pengetahuan dan wawasan selama saya menempuh studi: Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.A., Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA., Prof. Dr. H. Thoha Hamim, MA., Prof. Dr. H. Ali Haidar, M.A., Prof. Dr. H. Amin Abdullah, M.A., Prof. Dr. H. Sonhaji, M.A., Prof. Masdar Hilmy, S.Ag, MA., Ph.D, Prof. H. Achmad Jainuri, M.A, Ph.D., Prof. Dr. H. Zainul Arifin, M.Ag.

5. Seluruh staf program Pascasarjana dan staf perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, yang telah memberikan kemudahan administratif dan kemudahan memperoleh data kepustakaan selama studi.
6. Ayahanda K. Moh. Ismail dan Ny. Fatmawati, yang setiap malam dan harinya tidak pernah lepas mendoakan anak-anaknya. Tidak ada yang bisa saya balaskan untuk setiap tetes darah, keringat, dan air mata mereka berdua yang mengalir dengan ketulusan dalam upaya membesarkan saya dan adik-adik, kecuali doa semoga beliau mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT.
7. Istri tercinta dr. Anisa Nurul A., yang selalu setia dengan penuh kesabaran mendampingi saya dalam menyelesaikan studi program doktor. Terimakasih, telah menjadi “ruang” untuk semua yang kulakukan kepadamu, tawaku, egoku, cemburuku, idealisku, amarahku, perhatianku, kasih sayangku, dan semua perlakuan baik burukku kepadamu. “Semoga Allah meridoimu”..Amiin
8. Kakakku Drh. Syaiful Anam Al-Hafidz, M.Pd. dan adik saya Faizatul Muazzaroh, M.Pd., serta seluruh kerabat famili yang selalu memberi dukungan, doa, dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan studi program doktor.
9. Teman-teman sekelas saya yang luar biasa, tanpa terasa mereka adalah motivator saya dalam kehidupan belajar saya. Saya salut kepada mereka, dengan kesibukan pekerjaan yang dihadapi, seolah-olah kobaran semangat untuk mencari ilmu tidak pernah padam, meskipun harus meninggalkan keluarga.
10. Para intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur: Prof. Dr. K.H. Ahmad Zahro, MA., KH. Marzuki Mustamar, M.Ag., Dr. K.H. Imam Ghazali Said, MA., Dr. K.H. Ahmad Imam Mawardi, M.A., Dr. K.H. Sahid HM, M.Ag., Dr. K.H. Nasiri Abadi, M.H.I., Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, M.A., Dr. H. Saad Ibrahim, M.A., Prof. Dr. H. Abdul

B. Fikih Muamalah dalam Islam	38
C. Sejarah Bunga.....	44
D. Teori Bunga Menurut Bank Konvensional.....	50
E. Riba Menurut Hukum Islam.....	51
F. Dampak Bunga Bagi Perekonomian.....	61
G. Keberkahan Harta dan Akhlak Bermuamalah.....	67
BAB III : INTELEKTUAL NU DAN MUHAMMADIYAH SERTA PEMIKIRANNYA.	78
A. Intelektual Nahdlatul Ulama Jawa Timur.....	78
1. Prof. Dr. K.H. Ahmad Zahro, MA.,.....	78
2. KH. Marzuki Mustamar, M.Ag.....	93
3. Dr. KH. Imam Ghazali Said, MA.,.....	107
4. Dr. KH. Imam Mawardi, MA.,.....	116
4. Prof. Dr. KH. Sahid HM, M.Ag.,.....	127
5. Dr. KH. Nasiri Abadi, M.HI., MH.,.....	137
B. Intelektual Muhammadiyah Jawa Timur.....	150
1. Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, MA.,.....	150
2. Dr. H.M. Saad Ibrahim, MA.,.....	158
3. Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag.,.....	166
4. Dr. H. Nur Hakim, MA.,.....	178
5. Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum.,.....	190
6. Dr. Muhmmad Nafik H.R., ST., SE., MM.,	201
BAB IV : PEMIKIRAN INTELEKTUAL NU DAN MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TENTANG HUKUM BUNGA BANK	213

bahwa landasan atau dasar hukumnya adalah tidak ada unsur kedzaliman, tidak memberatkan salah satu pihak, meminjam istilah Al-Qur'an; *La tadhlīmūna wala tudhlamūn*, bahkan masing-masing pihak diuntungkan. Pihak bank diuntungkan dengan modal dari nasabah, selanjutnya nasabah diuntungkan untuk mengembangkan modal dengan keahlian pihak perbankan yang mampu mengembangkan modalnya, uang berputar sehingga banyak pihak yang diuntungkan

3. Sebagian intelektual NU mengatakan bahwa bunga bank adalah riba dengan alasan meminjam istilah hadis bahwa riba itu terdiri dari tujuh puluh tiga pintu dan yang paling ringan adalah seperti dosa menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Kalau bunga bank bukan riba, maka yang dimaksud hadis tersebut (tujuh puluh tiga itu) riba yang mana.
4. Menurut muktamar Ulama Islam yang diselenggarakan pada bulan Muharram tahun 1258 H (Mei 1965 M) di Aula Majma'ul Buhuts Al-Islamiyah di Al-Azhar Asy-Syarif, dan dihadiri oleh segenap pakar hukum, ekonomi, sosial dari berbagai negara, keputusan menyangkut bunga bank adalah bahwa keuntungan dari berbagai pinjaman adalah riba diharamkan. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara apa yang dinamakan pinjaman konsumsi dengan pinjaman produksi karena nash Al-Qur'an dan Sunnah secara keseluruhan telah menetapkan haramnya keuntungan dari kedua jenis pinjaman itu.
5. Mu'tamar NU di Bandar Lampung tanggal 21-25 Januari 1992 mengenai hukum bunga bank ditempuh melalui prosedur yang lebih metodologis lagi, sebagai penyeimbang keputusan Muktamar NU XII di Malang. Hasil keputusannya sebagai berikut: haram, kerana bunga bank dipersamakan

Berdasarkan obyek penelitian, baik tempat maupun sumber data, maka jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang termasuk penelitian kualitatif deskriptif, karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif, bukan kuantitatif yang menggunakan alat-alat pengukur dan data yang dihasilkan juga berupa data deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sejumlah intelektual NU dan Muhammadiyah secara individu dalam menyikapi hukum bunga bank konvensional.

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrument utama dalam pengumpulan data, sehingga dengan kemampuannya menyesuaikan diri dengan berbagai ragam realitas yang tidak dapat dikerjakan oleh instrumen *non-human*, dapat menangkap makna dan memahami fenomena yang terjadi di antara para intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur.

Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang wajar atau dalam *natural setting*, tanpa dimanipulasi dan tanpa diatur dengan eksperimen atau tes. Sumber data dalam penelitian ini diambil dalam situasi yang alami dengan mempertimbangkan konteks fenomena tersebut terjadi. Obyek penelitian ini berlokasi di kantor PW NU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) dan PW (Pimpinan Wilayah) Muhammadiyah Jawa Timur.

Penelitian ini ditujukan untuk membentuk teori berdasarkan keterkaitan antara data yang ditemukan dan berdasarkan temuan yang dihasilkan. Peneliti dapat menggunakannya sesuai dengan situasi dan kondisi.

Jika dikaitkan dengan masalah yang diteliti, yaitu "Studi tentang Pemikiran Intelektual Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur tentang

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data yang dikumpulkan dalam teknik ini cenderung merupakan data sekunder. Dokumen yang diteliti dapat terdiri dari berbagai macam, seperti notulen rapat, hasil *workshop* atau seminar, buku, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik ini untuk memperoleh data mengenai jumlah anggota organisasi tersebut, para pengurus serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan NU dan Muhammadiyah terkait dengan penetapan hukum bunga bank.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Analisis data penelitian ini bersifat interaktif (berkelanjutan) dan dikembangkan sesuai program. Analisis data dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data, dan setelah data terkumpul. Dengan menetapkan masalah penelitian, peneliti sudah melakukan analisa data terhadap permasalahan tersebut dalam berbagai perspektif teori dan metode yang digunakan. Dengan menganalisis data sambil mengumpulkan data, peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan dapat mengetahui metode mana yang harus dipakai pada tahap berikutnya.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dari hasil penelitian ini dibagi ke dalam lima bab, yang terdiri dari bab pendahuluan, lima bab pembahasan materi, dan satu bab penutup yang berisi

kesimpulan, saran dan implikasi teoritik. Secara kronologis sistematika tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

BAB I adalah Pendahuluan. Bab ini dibagi menjadi enam bagian. Pertama: Latar Belakang Masalah, yang menjelaskan tentang alasan penelitian ini dilakukan. Kedua: Identifikasi Masalah, yang melakukan identifikasi dan inventarisasi berbagai kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Ketiga: Rumusan Masalah, yang disajikan dalam bentuk pertanyaan. Keempat: Tujuan Penelitian, yang disajikan dalam bentuk pernyataan. Kelima: Kegunaan Penelitian, yang menjelaskan tentang manfaat penelitian. Keenam: Kerangka Teoritik, yang menjelaskan teori berbagai basis atau komparasi analisis dalam melakukan penelitian. Ketujuh: Penelitian Terdahulu, yaitu untuk mengetahui penelitian yang terdahulu dan ada relevansinya. Kedelapan: Metode Penelitian, yang dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan dapat terarah sesuai permasalahan yang diteliti. Kesembilan: Sistematika Penulisan, yang berisi pengungkapan alur pembahasan.

BAB II adalah Bunga Bank. Pada bab ini dijelaskan tentang bunga bank secara *kaffah* (universal) dengan tujuan untuk memberikan informasi lengkap mengenai kedudukan bunga bank. Pada bab ini sub pembahasan terbagi atas enam sub. Pertama, membahas bunga bank dalam catatan sejarah. Hal ini diperlukan untuk memberikan penjelasan tentang kapan bunga bank itu ada (dari masa pra-Islam hingga datangnya Islam). Kedua, membahas tentang pengertian dan landasan hukum bunga bank. Ketiga, membahas mengenai jenis-jenis riba dan dampaknya. Keempat, menjelaskan tentang urgensi fungsi bank dalam kegiatan transaksi ekonomi dan kehidupan modern ini. Kelima, membahas tentang perbedaan bank konvensional dan bank Islam dan, Keenam, menjelaskan secara tuntas tentang persoalan riba, bunga bank dan masyarakat Indonesia. Penjelasan ini perlu untuk memahami persoalan-

persoalan hukum serta akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan praktek bunga bank dalam masyarakat Indonesia sekarang.

BAB III adalah bab penyajian data hasil penelitian yang diberi judul bab Intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur serta Pemikirannya. Dalam bab ini dibahas mengenai biografi singkat intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur serta pandangannya secara individu atas realitas sosial mengenai kedudukan hukum bunga bank konvensional sesuai metode ijtihād fikihnya.

BAB IV adalah Analisis Pemikiran Intelektual NU dan Muhammadiyah tentang Hukum Bunga Bank Konvensional. Merupakan rangkaian inti dari pembahasan di dalam Disertasi ini, pada bab ini disajikan analisis pandangan intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur dengan hukum Islam sebagai "pisau" analisisnya.

BAB V: Penutup dan Kesimpulan. sebagai rangkaian terakhir dari pembahasan di dalam Disertasi ini, pada bab ini disajikan kesimpulan-kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam Disertasi, saran-saran serta rekomendasi yang mungkin bisa dilakukan oleh para pengkaji lain dalam menyikapi persoalan bunga bank konvensional.

perjanjian baru. Keinginan atau niat untuk mendapat imbalan melebihi apa yang dipinjamkan adalah suatu dosa. Bunga harus dikembalikan kepada pemiliknya. Harga barang yang ditinggikan untuk penjualan secara kredit juga merupakan bunga yang terselubung. Pada masa ini, umumnya pengambilan bunga dilarang.

Mereka merujuk masalah pengambilan bunga kepada kitab perjanjian lama yang juga diimani oleh orang Kristen. St. Basil (329-379M) menganggap mereka yang memakan bunga sebagai orang yang tidak berperikemanusiaan. Baginya, mengambil bunga adalah mengambil keuntungan dari orang yang memerlukan. Demikian juga mengumpulkan emas dan kekayaan dari air mata dan kesusahan orang miskin.

St. Gregory dari Nyssa (335-395M) mengutuk praktek bunga karena menurutnya pertolongan melalui pinjaman adalah palsu. Pada awal kontrak seperti membantu tetapi pada saat menagih dan meminta imbalan bunga bertindak sangat kejam. St. John Chrysostom (344-407M) berpendapat bahwa larangan yang terdapat dalam Perjanjian Lama yang ditujukan bagi orang-orang Yahudi juga berlaku bagi penganut Perjanjian Baru.

St. Ambrose mengecam pemakan bunga sebagai penipu dan pembelit (rentenir). St. Augustine berpendapat pemberlakuan bunga pada orang miskin lebih kejam dibandingkan dengan perampok yang merampok orang kaya. Karena dua-duanya sama-sama merampok, satu terhadap orang kaya dan lainnya terhadap orang miskin. St. Anselm dari Centerbury (1033-1109M) menganggap bunga sama dengan perampokan.

Pandangan Para Sarjana Kristen (Abad XII-XVI), niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan. Mengambil bunga dari pinjaman diperbolehkan, namun haram atau tidaknya tergantung dari niat si pemberi hutang.

Menurutnya pula, agama tidak perlu repot-repot mencampuri urusan yang berhubungan dengan bunga.

D. Teori Bunga Menurut Ekonomi Konvensional

a. Teori Agio Mengenai Bunga

Menurut teori ini bahwa bunga merupakan pemilikan uang yang dimiliki sekarang lebih tinggi nilainya daripada bila sejumlah yang sama dimiliki di masa datang. Artinya, menunggu tibanya masa datang (meminjamkan uang sekarang dan dikembalikan di masa datang) merupakan pengorbanan. Sehingga pengorbanan ini harus dihargai dengan apa yang disebut pengganti atau balas jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah bunga (*interest*).

b. Teori Klasikal atas Bunga

Bunga adalah harga kapital (*price of capital*) di mana ada permintaan (*demand*) akan kapital yang berhadapan dengan penawaran (*supply*) akan kapital. Permintaan akan kapital bersumber pada kebutuhan investasi (*investment*). Dan, penawaran akan kapital bersumber pada tabungan (*saving*). Apabila permintaan kapital meningkat dan penawaran kapital tetap, mekanisme pasar akan menetapkan harga kapital naik atau tingkat suku bunga (*interest*) naik. Sebaliknya, jika penawaran kapital meningkat dan permintaan kapital tetap, harga kapital (tingkat suku bunga) akan turun dan seterusnya.

c. Teori Neo Klasikal atas Bunga

Bunga adalah harga kapital (*price of capital*) tetapi mempunyai perbedaan dengan teori klasikal atas bunga yaitu permintaan akan kapital. Ini tidak saja untuk memenuhi kebutuhan investasi tetapi juga kebutuhan untuk konsumsi. Penawaran akan kapital tidak saja berasal dari sumber-sumber lain yang dapat

badai, namun sikap istiqamah ini mudah luntur ketika manusia berhadapan pada kesulitan kesulitan dalam kehidupannya.

Fathanah diartikan sebagai kecerdasan, kemahiran atau penguasaan terhadap bidang tertentu padahal makna fathanah merujuk pada dimensi mental yang sangat mendasar dan menyeluruh sehingga dapat kita artikan bahwa fathanah merupakan kecerdasan yang mencakup kecerdasan intelektual, emosional dan terutama spritual. Beberapa karakteristik yang terkandung dalam jiwa fathanah antara lain:

- a. *The man of wisdom*. Mereka tidak hanya menguasai dan terampil melaksanakan profesinya, tetapi juga sangat berdedikasi dan dibekali dengan hikmah kebijakan.
- b. *High in integrity*. Mereka sangat bersungguh sungguh dalam segala hal, khususnya dalam meningkatkan kualitas keilmuan dirinya.
- c. *Willingness to learn*. Mereka memiliki motivasi yang sangat kuat untuk terus belajar dan mampu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang dihadapinya.
- d. *Proactive stance*. Mereka bersikap proaktif, ingin memberikan kontribusi positif bagi lingkungan.
- e. *Faith in god*. Mereka sangat mencintai Tuhannya dan karenanya selalu mendapatkan petunjuk darinya.
- f. *Creditable and reputable*. Mereka selalu berusaha untuk menempatkan dirinya sebagai insan yang dapat dipercaya sehingga tidak pernah mau mengingkari janji atau mengkhianati amanah yang dipikulkan kepadanya.
- g. *Being the best*. Selalu ingin menjadikan dirinya sebagai teladan dan menampilkan unjuk kerja yang terbaik.
- h. *Empathy and compassion*. Mereka menaruh cinta kepada orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

Akhirnya, mengikuti pemikiran Hamka “ya diambil saja”! Perkara kotor dapat dibersihkan dengan tahajut, taubat, istighfar, yang penting diambil untuk menyuburkan tanaman yang mau mati. Di Malang Selatan, Pacitan, banyak kristenisasi, mending diarahkan kesana, begitu! Kenapa ulama kadang mensikapi bunga bank tidak terlalu tegas karena hal tersebut.

Untuk publik servis perusahaan-perusahaan kayak bank yang memberikan layanan publik, sulit sekali menerapkan sistem mudharabah atau sistem qiradh, sistem qiradh iku bertumpu pada amanah, kulo qiradh karo niki, mong konco wong sijdi, lakukno dhuik iku sak juta, sabhen tahun dihitung 50: 50, ngeh, kulo ngerti niki amanah, badhi sak juta yo kondo sak juta tenan, saya 50 % dari laba, yo 50 % temenan. Untuk layanan publik perusahaan-perusahaan seperti bank yang memberikan layanan publik, sulit sekali menerapkan sistem mudhārabah atau sistem qirādh. Sistem qirādh itu bertumpu pada amanah, saya bertransaksi qirādh dengan salah satu teman, dengan modal satu juta, dengan perjanjian pembagian keuntungan 50: 50. Saya paham kalau ini amanah, kalau untung satu juta ya bilang satu juta, saya 50 % dari keuntungan, ya 50 % beneran.

Qiradh perorangan niku tasek gampang, tapi kados Bank BCA bank BNI ngelayani 10 juta nasabah, 10 juta peminjam golek amanah khabeh memberi angel. Lek sampek mereka ngak amanah pake sistem qiradh, bank nanti 50 % laba kami 50 % laba, sampean, yo, teken, nyuun sewu, di akuntansi itu ada mata kuliah cara membuat pembukuan ganda, pembukuan intern untuk para pemegang saham ada sendiri, pembukuan keluar ke pemerintah, ke perpajakan ada sendiri, ngunu iku enek mata kuliah niku enek. Qiradh secara perorangan itu masih gampang, tetapi kalau Bank BCA, bank BNI melayani 10 juta nasabah, 10 juta nasabah cari yang amanah semua sulit. Kalau sampai mereka tidak amanah dengan sistem qiradh, bank dapat keuntungan 50 %, kami 50 % keuntungan, ok! Maaf, di akuntansi itu ada mata kuliah cara membuat pembukuan ganda, pembukuan intern untuk para pemegang

cukupkah itu difatwakan subhat? Ya sudah tidak apa-apa, katanya orang dalam sendiri bilang, bank muamalah dan semacamnya, itu kalau pasar lagi rame, bulan-bulan tertentu banyak orang pinjam, waktu pendaftaran kuliah banyak orang yang melakukan peminjaman, banyak sekali, sampai dana habis, tetapi peminjam masih banyak, akhirnya bank muamalah pinjam ke BI, lha, pinjam ke BI menggunakan sistem konvensional, jadi sama ruwetnya.

Riba dua pihak, satu untung, satu rugi, bank konvensional empat pihak, riba satu untung satu rugi, sistem konvensional ada bagi, cuma baginya berdasar prosentase klo qiradh berdasarkan prosentase laba, prosentase modal itu konvensional, prosentase laba itu qiradh, nah, itu melayani jutaan orang, barangkali sulit niku. Riba itu dua pihak, satu pihak untung, pihak yang lain rugi. Sedangkan bank konvensional itu empat pihak, riba satu untung satu rugi, bank konvensional ada bagi hasil, hanya saja pembagiannya berdasarkan prosentase, prosentase keuntungan itu qiradh, nah, itu meyalani jutaan orang, barangkali kemungkinan itu sulit.

Terakhir, kita ini ngak sendiri di Indonesia, kita hubungan dagang dengan Amerika dan seterusnya. Kalau di Indonesia tok full syar'i, anti begitu-begitu, anti tambahan, anti riba dan seterusnya. Amerika melakukan pembayaran disini ngak kita dikenakan biaya bunga tambahan, sementara kita melakukan pembayaran kesana dikenakan bunga, bukan bea cukai, bunga, antar bank iku lho, biasanya uang asing masuk ksini dikenakan oleh BI, uang kita masuk ke Amerika juga kena. Terakhir, kita ini tidak sendiri di Indonesia, kita punya kerjasama dagang dengan Amerika dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia menerapkan syari'ah secara total, anti begitu-begitu, anti tambahan, anti riba dan seterusnya. Amerika melakukan pembayaran disini tidak kita kenakan bunga tambahan, sementara kita melakukan pembayaran kesana dikenakan bunga, bunga bea cukai, bunga antar bank.

PNS itu. Itu hanya dibuat membangun rumah dan lain sebagainya, untuk biaya SPP anak-anaknya, dibuat beli ban, untuk yang dibuat beli beras dapat dari pemberian masyarakat.

Seng ora ngandani harom, subhat, ojok terus sembrono, ora opo-opo tak warekkie, seng ngaranie harom, yo ojok-kerreng-kerreng nemen, wong sak kerreng-kerrengie bank Mumalah dapat suntikan dana teko BI, sak kereng-kerengnge mungggah khaji numpak pesawat, perusahaan pesawat boeing, boeing milik Amerika, danane teko? Ngunu kue, lho piye ngono kue? Lha piye? Mboh termasuk yang mensubkatkan, mboh termasuk yang mengharamkan tak njaluk ojok kereng nemen-nemen, “ngono yo ngono nanging ojo ngono”.

Yang tidak menganggap haram, subhat, jangan terus sembarangan, tidak apa-apa dipuaskan, yang menganggap haram, jangan terlalu keras, sekeras-kerasnya, bank muamalat dapat suntikan dana dari Bank Indonesia, sekeras-kerasnya, jika naik haji naik pesawat, sedangkan perusahaan pesawatnya adalah boeing, boeing milik Amerika, dananya dapat dari bank. Lha, bagaimana? Bagi yang mensubhatkan atau yang mengharamkan, kami harapkan agar tidak terlalu keras: “sekalipun begitu tetapi jangan begitu”!

Koyoe kyai Masduki cerito, dua kyai di Gondang Legi, sitok kerreng sitok ngeslow, sing kyai kerreng, kyai, lare-lare kurang ngajar, ora adab, ora sopan wong solawatan kok karo tabuhan, niki ora sopan, solawat kok ditabuhi, niki ora sopan. Suatu ketika, kyai sing ngeslow niku saget bina lare-lare nakal teng prapatan-prapatan niku, dibina, ngoncene bocah-bocah dibina, kon ninggal gitar yo angel tetap gitaran mawon, tapi kon ninggal ngumbe sampun purun, kon ninggal nyanyian sing ele-elek lek koyok sak niki cucak rowo terus purun ganti solawatan, museke tetep tapi terus isine sholawat.

Seperti cerita kyai Masduki, ada dua orang kyai di Gondang Legi, satunya keras, satunya lagi kalem, yang kyai keras, kyai, anak-anak kurang ngajar, tidak beradab, tidak sopan, membaca sholawat kok dipukuli gendang, ini tidak sopan, sholawat kok digendangi, ini tidak sopan. Suatu ketika,

hikmah adalah sesuatu yang mempunyai sifat mendatangkan maslahat dan menolak mudarat (جلب المصالح ودرء المفساد). Dalam pada itu, hikmah mempunyai hubungan (*munāsabah*) dengan hukum, tetapi tidak dapat diukur dan tak dapat diamati. Artinya hikmah itu tidak harus *ḍāhir* dan *munḍābiṭ*, malah seringkali hikmah itu hanya dapat dirasa dan relativitasnya tinggi. Misalnya, hikmah disyari'atkannya jual-beli adalah menghindari “kesempitan” seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi, jual-beli dapat juga dilakukan tanpa alasan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka ulama Usul pada umumnya tidak menggunakan hikmah sebagai *'illat* hukum, tapi menggunakan *wasf ḥāhir* sebagai *'illat*, sebab sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa hikmah itu *khāfi* dan tidak *munḍābiṭ*. Sedang *'illat* itu *ḥāhir* dan *munḍābiṭ*. Bila mengatasi “*mashaqqah*” yang merupakan hikmah dibenarkannya *qaṣr* salat dijadikan dasar ketetapan hukum dan bukan “*safar*” , sementara *mashāqqah* itu sendiri relatif, maka kepastian hukum tidak tercapai. Oleh karena itu, maka *shari'* menjadikan safar itu sebagai *'illat* hukumnya, sebab ia adalah hal yang sudah jelas lagi pasti. Dalam kasus riba, bagi ulama Usul, riba itu diharamkan karena mengandung unsur *ẓulm*. Tapi karena *ẓulm* dipandang tidak dapat diukur dan diamati, maka mereka mencari sifat lahiriah riba sebagai kezaliman menuju *ẓulm*, yaitu tambahan yang diperjanjikan di muka. Ternyata, sifat tersebut relevan dengan rahasia yang terkandung dalam riba. Dengan demikian, menyebut *ẓulm* sebagai *'illat* riba adalah sejalan dengan *ta'īl* atas dasar hikmah.

Bila riba itu diharamkan karena ia merupakan tambahan yang diperjanjikan di muka, maka tambahan itulah yang menjadi esensi riba. Tapi, bila haramnya karena mendatangkan *ẓulm*, maka *ẓulm*-lah essensinya. Di muka telah dijelaskan bahwa sesungguhnya tambahan yang proporsional sesuai dengan nilai kurs itu tidak

mempunyai makna. Sebaliknya, ketidakadilan adalah hal yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, maka *'illat* larangan riba itu seharusnya *ẓulm*, dan bukan tambahan.

3. Penalaran *Istislāhi*

Penalaran *istislāhi* adalah penalaran yang menggunakan pertimbangan maslahat. Penalaran ini berangkat dari kasus untuk dikonsultasikan kepada nas. Dalam konteks ini, dicoba dikonfirmasi apakah bunga bank itu termasuk riba sebagaimana yang dimaksud al-Qur'an.

Bila melihat posisi dan fungsi sebuah bank, yakni sebagai penyalur dana, penerima simpanan demi keamanan uang penabung dan jasa-jasa lainnya, maka kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa jasa-jasa bank itu mendatangkan kesejahteraan bagi orang banyak. Menurut Ibrahim Hosen, bahwa bank dengan segala aktivitasnya termasuk persoalan baru dalam hukum Islam. Bank adalah subyek hukum yang berwujud badan/lembaga, bukan perseorangan. Baik nas maupun para *fuqaha'* ketika berbicara tentang transaksi ekonomi selalu dalam konteks subyek hukum yang berwujud perseorangan. Jadi meskipun formula bunga uang di perbankan itu sama dengan riba, tetapi karena ia mendatangkan keuntungan kepada orang banyak dan dilakukan oleh badan hukum, maka tidak diminta pertanggungjawabnya oleh *syari'* dan sekaligus dibenarkan.

Dengan pendapatnya itu, kita dapat mengetahui bahwa Hosen menempatkan perbankan sebagai persoalan baru dalam hukum Islam. Kerangka pemikiran seperti ini dapat dimasukkan sebagai penalaran *istislāhi*, karena fokus penalarannya diarahkan pada kenyataan akan besarnya manfaat bank sebagai poros siklus moneter

Pandangan Yusuf al-Qarḍawi ini didasarkan juga pada beberapa pendapat *fuqaha'* kontemporer seperti Muhammad Rasyid Ridha, Mustafa al-Zarqa, dan keputusan beberapa lembaga fatwa internasional seperti Lembaga Fatwa Kuwait, Majelis Ulama Dunia, ECFR, dan FCNA yang memiliki kesimpulan sama tentang bolehnya membeli rumah dengan memanfaatkan kredit bank berbunga (ribawiy) karena suatu kebutuhan yang mendesak. Alasan kedua yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qarḍawi adalah analisis manfaat dan keuntungan yang akan mengantarkan pada kemaslahatan hidup masyarakat muslim dimanapun.

Dasar acuan hukum bunga bank konvensional adalah merujuk kepada pandangan fuqoha' (ahli fiqh), *muhaddith* (ulama hadis) dan pendapat *mufassir* (ahli tafsir al-Qur'an), apabila kita perhatikan menjelang penyebutan riba dalam surat al-Rum ayat 39, al-Qur'an menyebutkan bahwa pemberi dan pengatur rezeki adalah Allah, maka menjelang pelarangan riba di dalam surat Ali Imran ayat 130, al-Qur'an juga menyebutkan kekuasaan-Nya atas langit dan bumi, serta kekuasaan-Nya mengampuni dan mengazab manusia. Penyebutan ini merupakan ancaman-ancang, agar seruan pada kalimat berikutnya, yakni larangan riba, dipatuhi dengan kesadaran bahwa pengabaian terhadap larangan itu mengakibatkan kekufuran.

Setelah al-Qur'an menyebut larangan riba pada ayat 130, ia menyuruh orang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, seraya cepat memohon ampun kepada-Nya. Kalau riba dilarang, maka infak harta, menahan marah, memaafkan orang, berbuat *ihsān*, diperintahkan oleh al-Qur'an dengan jaminan surga. Disini nampak lagi bahwa sesudah riba disebut, disebut pula lawannya, yakni infak, yang dalam surat al-Rum dan al-Nisā diungkapkan dengan istilah "zakat". Kiat lipat ganda yang tergambar pada ayat-ayat riba sebelumnya, diungkap dalam kelompok ayat ini secara eksplisit.

berinfaq secara diam-diam dan tidak menyakiti perasaan orang yang menerima. Pandangan bahwa infak itu akan menimbulkan kemiskinan, ditolak oleh al-Qur'an, malah dikatakan bahwa infak itu justru akan menguntungkan pelakunya. Jaminan yang sama diulang kembali dalam ayat 276-277 setelah al-Qur'an mempertentangkan riba dengan sedekah, karena orang menyangka bahwa riba sama halalnya dengan jual beli.

Pengontrasan antara riba dengan zakat dan padanannya, riba dinyatakan sebagai perbuatan sia-sia, sedang zakat dan padanannya adalah amal yang menguntungkan pelakunya, disebut dua kali. Sekali di kelompok surat al-Rum, periode Makkah, dan sekali lagi di kelompok surat al-Baqarah, periode Madinah. Setelah menguraikan tentang dampak riba, al-Qur'an menegaskan larangan praktek riba, sebagai ulangan atas larangan yang disebut dalam surat Ali Imran. Selanjutnya, mereka yang tidak mau menghentikannya, akan diperangi atas nama Allah dan Rasul-Nya. Sedang bagi mereka yang bertaubat, tidak mau mengambil riba lagi, maka ia berhak atas pokok pinjamannya, tanpa menimbulkan "kerugian". Diantara ayat-ayat yang membicarakan riba, surat al-Baqarah - khususnya ayat (278) - inilah yang paling lengkap riwayat sebab *al-nuzūl* (turunya).

Dalam kelompok ayat ini, al-Qur'an berbicara tentang riba dengan tahapan sebagai berikut: 1). Ia memulai pembicaraan dengan melukiskan pemakan riba sebagai orang yang kesetanan, tidak dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, sehingga ia menyamakan jual-beli dengan riba. Al-Qur'an menegaskan bahwa jual-beli itu halal, sedang riba itu haram. Oleh karena itu diingatkan bahwa orang yang menerima nasihat al-Qur'an akan beruntung, dan yang menentangnya diancam neraka. 2). Al-Qur'an menegaskan bahwa riba itu melumpuhkan sendi-sendi ekonomi, sedang sedekah menyuburkan kekuatan ekonomi. 3). Al-Qur'an memuji orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat dan membayar zakat. 4). Al-Quran menegaskan sekali lagi larangan riba, karena pernah dilarang

filsuf yang memiliki pengaruh besar pada generasi-generasi sesudahnya secara tegas mengutuk perbungaan uang. Menurut Aristoteles, fungsi uang yang utama adalah untuk mempermudah perdagangan, dan mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Plato juga berpendapat sama dengan Aristoteles, ia juga menutut praktek bunga.

Pada awalnya kerajaan Romawi juga melarang setiap jenis pemungutan bunga atas uang. Akan tetapi kemudian, dengan bertambah luasnya kerajaan dan munculnya kelas-kelas pedagang dalam masyarakat, lambat-laun timbullah praktik-praktik perbungaan uang. Namun, untuk melindungi masyarakat (para peminjam), pihak kerajaan membuat undang-undang guna membatasi besarnya suku bunga.

Pada abad pertengahan pembayaran bunga atau pinjaman uang disebut riba, dan undang-undang negara melarang keras pemungutan riba ini. Bahkan pada saat itu pandangan tentang riba ini dianggap sebagai suatu ajaran agama (gereja). Sampai abad ke-13, peraturan gereja merupakan peraturan yang tertinggi, dan pemungutan bunga uang dilarang.

Namun, pada akhir abad ke-13, pengaruh gereja mulai menurun, dengan munculnya kaum reformis. Reformis yang dipimpin oleh Luther dan Zwingle menyatakan bahwa praktik pembungaan uang merupakan akibat dari kelemahan manusia sendiri, sehingga peminjaman uang dengan dipungut bunga mulai diterima oleh masyarakat. Pandangan masyarakat yang demikian itu akhirnya menimbulkan efek samping berupa timbulnya nafsu untuk cepat memiliki kekayaan, sehingga kemudian muncullah hal-hal yang buruk di kalangan masyarakat. Akhirnya, larangan terhadap riba dikeluarkan di Eropa, antara lain di Inggris pada tahun 1545. Pada saat inilah perkataan riba diganti dengan istilah “bunga”, dengan maksud untuk memperlunak istilah tindakan manusia yang berhubungan dengan peminjaman uang.

Berbagai teori tentang bunga uang ini kemudian muncul, seperti teori mazhab klasik, teori *abstinence*, dan teori bunga produktif. Menurut mazhab klasik, bunga uang merupakan ganti rugi yang diberikan oleh peminjam kepada pemilik uang atas keuntungan yang mungkin diperoleh dari pemakaian uang tersebut. Sedangkan menurut teori *abstinence*, bunga adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang, karena ia telah bertindak “abstinece”, yaitu tindakan seseorang yang membatasi diri dari perbuatan yang kurang bermanfaat dan berbuat sesuatu yang bisa membawa hasil baginya untuk masa yang akan datang. Sementara menurut teori bunga produktif, produktivitas dianggap sebagai suatu kekayaan yang dihasilkan oleh modal, dan hasil dari modal inilah yang menjadi penyebab adanya bunga uang.

Selain teori-teori yang dikemukakan tersebut, terdapat pula teori bunga ditinjau dari sudut moneter. Menurut teori ini, bunga secara keseluruhan merupakan persoalan moneter. Besarnya suku bunga dalam teori moneter dianggap sebagai tingkat uang yang beredar di masyarakat, sehingga penentuan suku bunga seluruhnya merupakan barometer moneter. Kelanjutan dari teori ini menghasilkan dua teori, yaitu teori pinjaman uang dan teori keseimbangan kas.

Sahid menambahkan, dalam perspektif fikih, sebagian ulama membolehkan bunga bank dengan dalih bahwa bunga merupakan kompensasi dari terjadinya penurunan nilai uang di masa datang (inflasi). Inilah argumen yang sering digunakan. Menurut pendapat ini, bunga tidak hanya sebagai harga uang, tetapi juga imbalan risiko inflasi bagi pemilik uang. Pendapat ini sebenarnya sangat lemah, karena dalam perekonomian sekarang, bunga merupakan salah satu penyebab terjadinya inflasi sehingga sering dipergunakan instrumen untuk mengendalikan iinflasi. Jadi jelaslah, bunga merupakan penyakit ekonomi yang harus dihindari.

perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Islam sangat tegas melarang riba karena riba merupakan penyakit yang merusak dan menghancurkan ekonomi umat. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 umumnya dipicu oleh krisis moneter, lebih khusus lagi sektor perbankan dengan sektor bunganya. Faktor utamanya adalah penetapan suku bunga oleh otoritas moneter yang merusak mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Namun, hingga saat ini praktik riba tetap tumbuh subur di tengah masyarakat. Para ulama Indonesia berbeda pendapat tentang hukum bunga bank.

Perbedaan pendapat tentang bunga bank ini terjadi ketika di negara-negara muslim, termasuk Indonesia, belum didirikan bank Islam. Di Indonesia, setelah bank Islam didirikan di berbagai kota, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2004 mengeluarkan Fatwa Nomor: 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank konvensional (interest) saat ini telah memenuhi kriteria riba dan hukumnya haram, dan umat Islam diimbau untuk bermuamalah dengan bank-bank syari'ah yang sudah didirikan di berbagai kota. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tiga belas tahun fatwa MUI dikeluarkan, dengan berbagai alasan, umat Islam belum seluruhnya mengalihkan dananya dari bank-bank konvensional ke bank-bank syari'ah.

Menurut H. Sahid bahwa metode *istinbāt* hukum bunga adalah berdasarkan pada kedudukan hukum bunga bank konvensional, yaitu adakalanya halal atau sebaliknya menjadi haram. Dikatakan halal apabila bunga bank itu digunakan atau menghasilkan hal-hal yang bersifat produktif, dibuat modal usaha sehingga mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Namun, haram hukumnya jika bunga bank itu digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, misalnya meminjamkan

untuk mengumpulkan pula biaya peperangan melalui riba. Ayat ini turun mengingatkan mereka agar jangan melangkah ke sana.

Riba dibicarakan oleh al-Qur'an melalui empat tahapan, mirip dengan pertahapan pengharaman khamr (minuman keras). Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif, yaitu surat ar-Rum ayat 39. Kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (QS. an-Nisa': 161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara tegas dinyatakan keharaman salah satu bentuknya, yaitu yang berlipat ganda (QS. al-Imran: 130, kemjudian yang terakhir, pengharaman total dan dalam berbagai bentuknya yaitu pada QS al-Baqarah 278.

Di dalam permulaan ayat ke 39 surat ar-Rum di atas, Allah SWT memulainya dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman, disusul dengan larang memakan riba. Dimulainya demikian, memberi isyarat bahwa bukanlah sifat dan kelakuan orang yang beriman memakan yakni mencari dan menggunakan uang yang diperolehnya dari praktek riba. Riba atau kelebihan yang dibicarakan oleh ayat di atas, adalah yang sifatnya *ad'āfan muḍā'afah*. Kata *ad'āfan* adalah bentuk jamak dari *di'f* yang berarti serupa sehingga yang satu menjadi dua. *Di'fain* adalah bentuk dua, sehingga jika anda mempunyai dua mata maka ia menjadi empat, *ad'āfan* adalah berlipat ganda. Memang demikian itulah kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Jahiliyah. Jika seseorang tidak mampu membayar hutangnya, ia ditawarkan atau menawarkan penangguhan pembayaran, dan sebagai imbalan penangguhan itu, ia pada saatnya ketika membayar hutang, membayarnya dengan berlipat ganda.

Kata *ad'āfan muḍā'afah* bukanlah syarat bagi larangan ini. tetapi sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu. Betapapun keputusan akhir bagi yang melakukan transaksi hutang-piutang adalah firman-Nya: "Bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (QS.al-Baqarah: 279). Memang boleh jadi

Memang, persoalan klasik yang selalu muncul dalam *fiqh muamalah* adalah ketika masalah riba dihadapkan pada persoalan bunga bank. Di satu pihak, bunga bank terperangkap dalam kriteria riba, tetapi di pihak lain, bank mempunyai fungsi sosial, dan bahkan dapat dikatakan, tanpa bank suatu negara akan hancur. Dalam konstelasi pembangunan nasional, terutama di sektor ekonomi, partisipasi dunia perbankan menduduki tempat yang vital. Hal ini karena perbankan mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sehingga eksistensi perbankan akan berpengaruh, tidak saja dalam rangka meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga pada stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, yang menunjang pembangunan.

Klarifikasi mengenai hakikat riba akan menentukan pandangan dan sikap terhadap bunga uang yang selama ini dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan dan perbankan konvensional. Apakah bunga uang pada akhirnya akan dapat diterima atau tidak, begitu pula konsekuensinya dengan lembaga-lembaga perbankan konvensional dapat diterima atau tidak, tergantung pada klarifikasi mengenai hakikat riba tersebut.

Pro dan kontra di sekitar hukum bunga bank itu, bukan saja terjadi di kalangan sarjana muslim, tetapi juga di kalangan para ahli non-muslim, bahkan para filosof seperti Plato telah mengharamkan riba. Di Indonesia, para ulama juga tidak sependapat mengenai bunga bank. Ada yang mengharamkan, ada yang mengatakan syubhat, dan ada pula yang mengatakan boleh karena darurat, dan bahkan ada yang membolehkan secara mutlak.

Ketika mengkaji sejarah berdirinya Bank Islam, merujuk hasil lokakarya Bank Tanpa Bunga yang diadakan pada tanggal 18-20 Agustus 1990, sebagai langkah persiapan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI), memperlihatkan sikap kaum muslimin terhadap bunga bank. Ada peserta yang menyetujui bunga bank dan ada pula yang menganggap bunga

bank itu sebagai riba. Bahkan menurut Noor, hasil survey majalah *Info Bank* (April 1990) menunjukkan sikap terhadap bunga bank sebagai berikut: 31,7% tidak setuju, 25,9% kurang setuju, 8,1% sangat tidak setuju, dan 34,3% setuju. Hal ini berarti bahwa hampir dua pertiga responden tidak setuju dengan bunga bank.

Adanya perbedaan pendapat dalam masalah bunga bank tersebut, pada akhirnya menyebabkan ketidaktenangan umat Islam dalam bermuamalah dengan bank konvensional, sehingga muncullah gagasan tentang perlunya didirikan bank Islam di Indonesia. Terlepas dari perbedaan pendapat dimaksud, yang pasti kenyataan menunjukkan bahwa umat Islam pada umumnya merasa ragu-ragu dan bahkan bersikap mendua. Di satu pihak, sesuai dengan perkembangan kebutuhan ekonomi, mereka harus berhubungan dengan bank, di pihak lain, mereka merasa khawatir akan ribanya bunga bank. Apakah bunga Bank itu termasuk kategori riba atau tidak? Berikut ini masalah ini akan dijelaskan dalam pandangan para ulama Fiqh.

Menelisik sedikit soal ekonomi, melakukan aktifitas ekonomi itu merupakan tabiat manusia untuk memenuhi hajat hidupnya. Dengan kegiatan itu, ia memperoleh rezeki dan dengan rezeki itu, ia dapat melangsungkan kehidupannya.

Bagi seorang muslim, al-Qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mengandung kebenaran absolut. Sedang sunnah Rasulullah saw. berfungsi menjelaskan kandungan al-Qur'an. Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan al-Sunnah yang memberikan motivasi kepada manusia untuk rajin bekerja, termasuk melakukan kegiatan ekonomi, dan mencela orang yang pemalas. Tetapi tidak setiap kegiatan ekonomi dibenarkan oleh al-Qur'an. Apabila kegiatan itu memiliki watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang, misalnya monopoli dagang, riba dan lain sebagainya, maka pasti akan ditolak.

Menurut Ali Mufrodi, ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hukum dapat dilihat dari dua dimensi. Dimensi legal spesifik, yaitu gambaran tentang kasus-kasus, melalui pengamatan asbab nuzul (sebab turunnya ayat), dengan hukum yang harus dijalankan. Sedang dimensi yang kedua adalah sasaran yang hendak dicapai, yang bermuara pada "ideal moral". Tampaknya ia bermaksud bahwa ketetapan hukum al-Qur'an yang bersifat "kasuistik", meskipun harus diperhatikan, tetapi tidak dapat diterapkan secara universal, bila "ideal moral" nya dan sasaran yang dituju tidak lagi sejalan dengan hukum kasuistik tersebut. Keuniversalan pesan al-Qur'an pada sasaran tersebut, bukan pada hukum yang bersifat kasuistik.

Metode istinbāt hukum berkaitan dengan masalah riba, sebagai satu bentuk kegiatan ekonomi terlarang, al-Qur'an membicarakannya di empat tempat. Agar pemahaman kita dapat tertolong dengan baik, maka dalam mengkaji masalah riba dalam al-Qur'an ini akan digunakan pendekatan *munāṣabat*, yakni sebuah pendekatan dengan melihat hubungan antara ayat atau surat yang sedang dikaji maknanya. Dalam hal ini, akan dicoba diterapkan pendekatan *munāṣabat* antara kelompok-kelompok ayat, yakni ayat-ayat riba. Masing-masing kelompok ayatnya dikaitkan dengan ayat-ayat sesudah dan sebelumnya, agar konteks dan pesannya secara utuh dapat dimengerti secara baik. Setelah masing-masing kelompok ayat riba dipahami dalam konteksnya, dilanjutkan dengan memadukan semua kelompok ayat riba. Dengan cara demikian, maka akan ditemukan essensi riba secara utuh sesuai dengan pesan al-Qur'an. Kata riba ini disebut delapan kali dalam al-Qur'an. Wahyu pertama yang membahas masalah ini turun di Makkah, sedang tiga wahyu lainnya turun di Madinah. Metode yang ditempuh al-Qur'an dalam melarang riba ini sama seperti ketika Allah melarang *khamr*, yakni secara bertahap. Menurut 'Abdullah Darraz, sesungguhnya kebiasaan al-Qur'an dalam mengobati penyakit yang sudah berurat-akar di tubuh bangsa-bangsa, dan diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya, tidak merubahnya

yang menjadi wacana dan sampai sekarang masih konvensional ialah apakah bunga bank sama dengan riba, sehingga hukumnya haram, ataukah keduanya tidak sama, sehingga hukumnya juga tidak sama.

Dalam garis besarnya terdapat empat bentuk pemikiran berkaitan dengan hukum bunga bank. Pertama, pemikiran yang menganggap antara bunga bank dan riba adalah dua hal yang sama, sehingga hukumnya juga sama-sama haram. Kedua, antara keduanya terdapat perbedaan esensial, sehingga hukumnya juga berbeda satu sama lain. Jika riba adalah haram, maka bunga bank hukumnya mubah.

Ketiga, terdapat ketidakjelasan persamaan dan perbedaan antara keduanya, sehingga hukum bunga bank adalah syubhat, yang oleh karena itu harus dihindari. Keempat, pemikiran yang menganggap hanya dalam kondisi tertentu saja bunga bank itu hukumnya haram. Kondisi tertentu itu ialah bukan dalam situasi dharurat atau bunganya berlipat ganda atau adanya kedzaliman atau dipersyaratkan adanya bunga pada waktu transaksi.

Pemikiran pertama, didasarkan atas argumen bahwa baik bunga bank maupun riba, di dalamnya sama-sama ada *ziyādah* (tambahan) dari beban pokok pinjaman. Oleh karena riba itu menunjuk makna tambahan, maka hal itu tidak ada bedanya dengan bunga bank, yang berarti hukumnya sama-sama haram. Pemikiran kedua, dibangun atas alasan bahwa sekalipun antara riba dan bunga bank itu sama-sama di dalamnya terdapat tambahan atas pokok pinjaman, tetapi keduanya berada dalam konteks sosioekonomis yang berbeda, sehingga hukumnya juga berbeda.

Dari konteks sosial, lembaga perbankan belum dikenal oleh masyarakat obyek regulasi larangan institusi riba pada masa Nabi Muhammad SAW itu, dan mereka yang menjadi korban praktik riba berada pada level sosial kelas *the have not*. Dengan bukti

ketidakmampuan mengembalikan pokok pinjaman menyebabkan terbebani tambahan. Tentunya jika mereka mampu melunasi pada waktu sebelum jatuh tempo keharusan pelunasan, logikanya mereka akan membayar hutang itu dari pada harus menyerahkan tambahan atas pokok pinjaman tersebut. Tidak bisa tidak, harus dipahami bahwa hal tersebut terjadi atas mereka yang memang tergolong pada kelompok tidak mampu.

Ali Mufrodi menambahkan, dalam konteks ekonomi, mengingat alat tukar barang yaitu uang, ketika dibuat dari bahan emas atau perak sehingga nilai intrinsiknya tidak terpisahkan dari nilai logam mulia tersebut maka hampir dapat dipastikan inflasi tidak terjadi. Jika inflasi tidak terjadi maka nilai uang akan tetap sama dalam waktu kapan saja. Ini berbeda dengan kondisi sekarang yang uang pada umumnya dibuat dari bahan kertas. Pemikiran ketiga diletakkan atas pertimbangan adanya ketidakjelasan kesamaan dan perbedaan *illat* antara riba dan bunga bank, sehingga hukumnya adalah syubhat dan demi kehati-hatian bunga bank harus dihindari. Pemikiran keempat dibangun atas dasar bahwa tambahan saja, tidak otomatis mengakibatkan bunga bank menjadi haram, mengingat nabi Muhammad SAW sendiri biasa membayar hutangnya lebih dari pokok pinjaman.

Oleh karena itu, keharamannya bukan terletak semata-mata pada bunga bank itu sendiri, tetapi pada kondisi tertentu yang menyertainya, misalnya keterlipatgandaannya, pemberian syarat keharusan memberi bunga, adanya kezaliman di dalamnya. Ada juga yang menghubungkannya dengan keadaan darurat, dalam arti ketika tidak ada pilihan lain selain institusi bank untuk melakukan *saving money* dan hal-hal lain yang terkait dengannya.

Secara metodologis, upaya menentukan hukum bunga bank memerlukan penerapan manhaj sebagaimana dituntut oleh ilmu *uṣul al-fiqh*, terutama karena persoalan ini tidak tertuang secara langsung dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Pada umumnya manhaj yang dipergunakan adalah qiyas, dengan menjadikan riba sebagai *al-aṣhl (reference point)*, haram

merupakan hukumnya, bunga bank adalah *al-far'* sebagai sesuatu yang akan dianalogkan pada riba, dan adanya kesamaan illat, sebagai alasan logis yuridisnya untuk keabsahan analog tersebut. Mengingat kesamaan illat merupakan alasan logis yuridisnya keabsahan analog, maka pada aspek inilah optimalisasi upaya menemukan illat pada ushul dan menganalisa keberadaannya pada *far'* harus ditekan. Upaya tersebut dikenal dengan terma *ta'lil al-hukm*.

Secara prosedural, *ta'lil al-hukm* dimulai dengan mengidentifikasi semua kemungkinan yang dapat dijadikan alasan logis yuridis ketetapan hukum pada ashal, kemudian melakukan klarifikasi terhadapnya ke dalam dua katagori yaitu kongkrit (*munḍābiṭ*.) dan abstrak (*ghair munḍābiṭ*.). Oleh karena illat hukum iu tidak boleh berkatagorikan abstrak (*ghair munḍābiṭ*.), maka proses berikutnya ialah dilakukan reduksi terhadapnya, sehingga tinggal alasan logis yuridis katagori *munḍābiṭ* saja, selanjutnya alasan tersebut ditetapkan sebagai illat hukum. Illat hukum inilah kemudian dicari pada *far'*, dan jika memang ada padanya secara persis, maka ketentuan hukum yang ada pada ashl diberlakukan terhadap *far'*. Sebaliknya jika illat hukum tersebut ada tapi tidak persis, atau tidak ada pada *far'*, maka ketentuan hukum pada ashl tidak dapat diberlakukan ketetapanannya pada *far'*, maka ketentuan hukum pada *ashl* tidak dapat diberlakukan ketetapanannya pada *far'*. Dalam hal ini berlaku kaidah *al-qiyās ma' al-fāriq baṭil* (analog terhadap hal yang berbeda adalah gugur).

Riba diharamkan memiliki berbagai kemungkinan alasan logis yuridis yang tertuang dalam berbagai *naṣh*. Jika hal tersebut diidentifikasi, akan didapati sejumlah kemungkinan yang meliputi: *ad'āf muḍā'afah* (Ali Imran 130) –adanya keterlipatgandaan tambahan(bunga); *dhulm* (al-Baqarah 279)- adanya tindak eksploitasi; *ziyādah* (al-Rum 39)- tambahan terhadap pokok pinjaman; dan *isthiraṭ al-ziyādah* (mafhum terhadap hadits

Aliyah al-Fatah Siman Lamongan lulus tahun 1975. Sarjana lengkap Jurusan Tafsir Hadis diperolehnya tahun 1984. S2 Jurusan Dirasah Islamiyah PPs. UM. Malang tahun 1998. Lulus S3 Jurusan Dirasah Islamiyah PPs. IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2009. Karya ilmiah berupa Buku yang sudah diterbitkan antara lain; 1. Pelaku Ekonomi Warga Muhammadiyah dan Bunga Bank yang diterbitkan oleh Graha Pustaka Islamic Multimedia, 2009. 2. Pengantar Studi ilmu-ilmu al-Qur'an. Penerbit Graha Pustaka Islamic Multimedia, 2010. 3. Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam. Penerbit, PMN Surabaya kerjasama dengan IAIN Press, 2011. 4. Al-Qur'an Sebagai Pilar Ekonomi Kontemporer, Penerbit; PMN Surabaya kerjasama dengan IAIN Press, 2011. 5. Pesan al-Qur'an tentang dasar-dasar ekonomi, penerbit PMN Surabaya, tahun 2002. 6. Metodologi Tafsir Kontemporer dengan Pendekatan Interdisipliner, 2014. 7. Memahami akad-akad dalam perbankan Syari'ah dan Dasar-Dasar Hukumnya, 2015.

Menurut anggota Majelis Tarjih dan Pembaruan Hukum Islam PW Muhammadiyah Jawa Timur ini bahwa persoalan bunga bank dalam pembahasan ulama fiqh klasik tidak dijumpai pembahasan tentang kaitan antara bunga bank dengan riba, karena sistem perekonomian dengan bank belum dikenal di zaman mereka. Pembahasan bunga bank apakah termasuk bunga atau tidak baru ditemukan dalam berbagai literatur fiqh kontemporer. Wahbah az-Zuhbahili, pakar fiqh Syria, membahas hukum bunga bank melalui kaca mata riba dalam terminologi ulama-ulama klasik dalam berbagai mazhab fiqh. Menurutnyaa, apabila standar yang digunakan adalah pandangan para ulama mazhab fikih klasik, maka bunga bank termasuk riba an-nasi'ah karena menurutnya bunga bank itu termasuk kelebihan uang tanpa imbalan dari pihak penerima dengan menggunakan tenggang

utang tidak dibayar tepat waktu, maka lembaga ini pun menetapkan bahwa bunga bank termasuk riba yang diharamkan.⁷⁴

Abdul Hadi menambahkan, di kalangan organisasi Islam di Indonesia terdapat pula perbedaan pandangan Muhammadiyah, ‘Illat keharaman riba itu adalah eksploitasi pihak pemodal (bank) terhadap yang lemah. Dengan perkataan lain, ‘illatnya adalah kedzaliman, sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah, 2: 279. Menurut keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah yang dilangsungkan di Malang pada tahun 1989, bunga bank itu bersifat *mustahibat* (disayangi) apabila banknya adalah bank swasta, bahkan cenderung mengharamkan bunga swasta. Sedangkan bunga bank yang terdapat pada bank-bank pemerintah, hukumnya, boleh (halal); tidak termasuk riba. Alasan yang dikemukakan antara lain adalah bahwa bank pemerintah dianggap badan yang mencakup hampir semua kebaikan dalam alam perekonomian modern dan dipandang memiliki norma yang menguntungkan masyarakat di bidang kemakmuran. Bunga yang dipungut dari sistem perkreditan sangat rendah sehingga sama sekali tidak ada pihak yang dikecewakan.

Di samping itu, bunga yang dipungut bank dari peminjam uang di bank pemerintah akan digunakan juga untuk kemaslahatan bersama bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pungutan bunga yang dilakukan bank-bank pemerintah pada akhirnya akan dikembalikan pada rakyat Indonesiadan untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Sedangkan bunga yang dipungut bank swasta adalah untuk kepentingan pribadi pemilik bank. Oleh karena itu, sikap tolong menolong tidak terlihat pada bank ini dan seluruh keuntungan bank menjadi milik pribadi pemegang saham; karenanya dihukumkan *mustahibat*. Akan tetapi, Kasman Singodimedjo, tokoh Muhammadiyah sendiri menyatakan bahwa melihat beberapa konsiderasi keputusan Tarjih Muhammadiyah itu dan bahwa ‘illat zalim sebenarnya juga

⁷⁴ Abd. Hadi, *Memahami Akad-Akad Dalam Perbankan Syariah dan Dasar-Dasar Hukumnya* (Surabaya: Sinar Terang, 2015), 74.

Berdasarkan alasan tersebut, maka *qayyid* dalam ayat riba, yakni *ad'āfan muḍā'afah* seperti tersebut dalam surat Ali Imran, tidak menjadi syarat bahwa untuk haramnya riba itu harus ‘berlipat ganda’, sebagaimana dikemukakan Rida. Hanya saja sifat lipat ganda yang melekat pada riba dalam pandangan Rida itu tidak ada ketegasan, dalam arti lipat ganda atas bunga atau jumlah pinjaman.

Terlepas dari perbedaan argumentasi yang dikemukakan oleh kedua pihak (*mutaqaddimin dan mutaakhkhirin*), nampaknya mereka sepakat bahwa riba yang diharamkan oleh al-Qur'an adalah riba yang dipraktikkan masyarakat Jahiliyyah, yang mengandung unsur pokok “lipat ganda”, sehingga menimbulkan kesengsaraan (*ẓulm*). Hanya saja, satu pihak melihat bahwa *ẓulm* itu karena riba berunsur lipat ganda, sedang pihak lain mengatakan tanpa unsur itu, riba tetap menimbulkan *ẓulm*.

Meskipun ‘Abduh, sebagai guru Rida, tidak secara eksplisit menyebut bunga bank itu sebagai riba, tapi sikap tak simpatinya terhadap operasional bank yang dilihatnya, nampak bahwa ia tidak menghalalkan bunga bank. Sikap *ambiguitas* ini semakin nampak ketika ia dihadapkan pada masalah bunga Tabungan Pos, dimana ia cenderung menghalalkannya. Padahal, baik bank maupun kantor Pos itu sama-sama membayar bunga kepada para penyimpan. Jadi rupanya sikap ‘Abduh terhadap bank itu dalam konteks orang miskin sebagai “peminjam”, dan bukan sebagai “penyimpan” seperti pada Kantor Pos, sehingga peluang adanya *ẓulm* itu besar kemungkinannya.

Sementara itu, mayoritas Fuqaha' membagi riba pada dua macam, yaitu riba *nasī'ah* dan riba *faḍl*. Sedang mazhab Syafi'i yang membaginya menjadi tiga, yaitu riba *faḍl*, *nasī'ah* dan *yad*. Ayat al-Qur'an yang ditunjuk sebagai dalil dilarangnya kedua macam riba tersebut adalah ayat-ayat yang terdapat dalam al-Baqarah dan Ali Imran, tetapi dalam

penawaran kapital tetap, mekanisme pasar akan menetapkan harga kapital naik atau tingkat suku bunga (*interest*) naik. Sebaliknya, jika penawaran kapital meningkat dan permintaan kapital tetap, harga kapital (tingkat suku bunga) akan turun dan seterusnya.

Sementara, teori neo-klasik mengemukakan bahwa bunga adalah harga kapital (*price of capital*) tetapi berbeda dengan teori klasik, permintaan akan kapital tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan investasi tetapi juga kebutuhan konsumsi. Penawaran akan kapital tidak hanya berasal dari tabungan tetapi juga berasal dari sumber-sumber lain yang dapat dipinjamkan, termasuk penciptaan kredit bank. Karena itu, teori neo-klasik ini disebut *loanable fund theory*.

Teori likuiditas menyebutkan bahwa bunga adalah harga uang (*price of money*). Uang diperlukan berdasarkan motif-motif untuk keperluan transaksi (*transaction motive*), untuk keperluan berjaga-jaga (*precautionary motive*), dan untuk keperluan spekulasi (*speculative motive*). Uang sebagai aset cair (*liquid asset*) yang bisa dicairkan menjadi apa saja dan untuk apa saja sehingga teori ini sering pula disebut *liquidity preference theory*.

Intinya, tinggi rendahnya harga uang atau *interest* ditentukan oleh preferensi pemilikan aset likuid sebagai permintaan akan uang (*demand for liquidity*), yang ditentukan pula oleh tersedianya jumlah uang (*money supply*) yang beredar atau diedarkan. Apabila *demand for liquidity* naik dan *money supply* tetap maka harga uang (*interest*) akan naik. Apabila *money supply* naik dan *demand for liquidity* tetap maka harga uang (*interest*) akan turun, dan seterusnya.

Menelisik soal *interest* (riba), secara harfiah, riba dalam bahasa Arab berarti lebih (bertambah), sedangkan menurut syari'ah, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu. Ada berbagai pendapat tentang riba, yang pada umumnya menegaskan bahwa riba

adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Al-Qur'an memakai kata riba untuk bunga. Pengertian riba dalam kamus adalah kelebihan, peningkatan, atau surplus. Dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan pendapatan yang diterima si pemberi pinjaman dari si peminjam, kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjam, yaitu sebagai upah atas dicairkannya sebagian harta dalam waktu yang ditentukan. Dalam Islam, riba berarti kelebihan yang diminta dengan cara khusus.

Berbicara tentang riba, Ibn Hajar al-Askalani mengatakan, esensi riba adalah kelebihan, baik berupa barang maupun uang, seperti uang dua dinar sebagai pengganti satu dinar. Menurut pendapat al-Allamah Mahmud al-Hassan al-Tanuki, riba berarti “kelebihan atau kenaikan. Disebut riba jika dalam suatu akad barter seseorang meminta adanya kelebihan satu benda untuk benda yang sama.”

Menurut pendapat Syah Waliyullah dari Delhi, unsur riba terdapat pada utang yang diberikan dengan syarat si peminjam bersedia membayarnya lebih banyak dari apa yang telah diterimanya. Menurut pandangan Abu Bakar ibn al-Arabi, setiap kelebihan yang tidak ada sesuatu pun yang dikembalikan sebagai penggantinya disebut riba. Abu Qatadah mengatakan bahwa sebelum kedatangan Islam, yang disebut riba adalah jika seseorang menjual barangnya pada orang lain untuk jangka waktu tertentu, dan ketika sampai batas waktu yang ditentukan si pembeli tidak dapat membayarnya, si penjual memberikan perpanjangan waktu pembayaran seraya menaikkan harga belinya.

Menurut Mujahid, unsur riba terdapat dalam setiap bentuk transaksi pada masa pra-Islam. Setiap kali seseorang mengadakan perjanjian pinjaman, ia akan meminta pada krediturnya untuk memberikan jangka waktu pembayaran yang panjang. Lalu, ia berjanji

akan mengembalikan padanya dengan sejumlah kelebihan yang ditentukan dari uang pokok yang dipinjamkan.

Dalam bahasa Inggris, kata *riba* sering diartikan dengan kata *usury* yang dalam penggunaan modern berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik. Sedangkan kata *riba* dalam bahasa Arab berarti tambahan atau kelebihan, meskipun sedikit, atas jumlah pokok yang dipinjamkan. Karena itu sedikit atau banyak kelebihan dari pokok pinjaman, semua termasuk *riba* yang diharamkan. Jika kita pelajari berbagai macam bentuk bisnis dan transaksi kredit ribawiy yang lazim dipraktikkan bangsa Arab pada masa Rasulullah, bunga berarti kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman yang diterima kreditur secara kondisional dalam hubungannya dengan waktu yang ditentukan. Jadi, ada tiga unsur utama dalam *riba*, yaitu kelebihan atau surplus di atas pokok pinjaman, penetapan kelebihan yang dikaitkan dengan waktu pengembalian pinjaman, dan transaksi yang menjadi syarat pembayaran kelebihan tersebut. Ketiga unsur itulah yang menjadi ciri utama *riba*. Berbagai bentuk transaksi kredit atau tawar-menawar, dalam bentuk uang atau lainnya, yang mengandung ketiga unsur tersebut dikategorikan sebagai *riba* oleh para ahli hukum ekonomi Islam.

Dalam sistem keuangan konvensional, eksploitasi, predatori, dan intimidasi dapat terjadi. Eksploitasi dapat terjadi pada saat tingkat suku bunga tinggi maupun rendah. Pada saat suku bunga tinggi, yang dieksploitasi adalah debitur, yang umumnya terjadi di tengah buruknya kondisi ekonomi. Pada saat seperti itu, debitur mendapat keuntungan yang rendah atau merugi, karena ia harus membayar bunga yang tinggi. Di tengah kondisi seperti itu dapat terjadi predatori dan intimidasi (paksaan untuk membayar bunga walaupun tidak mampu) kepada debitur. Ketika kondisi ekonomi membaik, ketika suku bunga rendah, pihak kreditur lah yang dieksploitasi dan debitur mendapat keuntungan yang tinggi.

Sebenarnya, bukan hanya Islam yang mengharamkan riba, Agama-agama lainnya pun, termasuk Yahudi, melarangnya meskipun sebagian mereka membolehkannya ketika berhubungan bisnis dengan bangsa selain Yahudi. Disebut dalam kitab Eksodus, 22: 25.

Jika kamu meminjamkan uang kepada orang miskin di kalangan pengikutku, kamu tidak boleh bertindak seperti pemberi pinjaman; kamu tidak boleh menari bunga darinya.

Budaya dan peradaban lain selain Islam pun banyak yang mengharamkan bunga karena dianggap merusak tatanan masyarakat. Pada zaman Babilonia Kuna, terutama zaman Raja Ur Nammu (2113-2096 SM) dan Hammurabi (1792-1750 SM), masyarakat telah mempraktikkan sistem bagi hasil dan sistem bunga dalam transaksi ekonomi mereka. Pada waktu itu, para pedagang telah menjalankan usaha perbankan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang. Bunga pinjaman tertinggi ditentukan 20 % pertahun. Bank pertama yang didirikan pada zaman Babilonia adalah Igibi bank yang berkembang pesat pada abad VI SM.

Sistem bunga juga telah dibahas dalam teks-teks India Kuna (Iqbal & Mirakhor, 2007: 69), seperti dalam naskah Weda (2000-1400 SM), Sutra (700-100 SM) dan Jataka (600-400 SM). Teks-teks tersebut menyebutkan istilah *usurer (kusidim)*, yang berarti bunga pinjaman (riba). Mereka menganggap riba sebagai perbuatan yang menjijikan dan bertentangan dengan nilai-nilai persaudaraan. Kitab Jataka membahas tentang larangan bagi kasta Brahmana dan Ksatria untuk meminjamkan uang dengan memungut bunga.

Sementara di zaman Yunani Kuna, kita menenal dua filsuf yang mengecam sistem bunga, yaitu Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (348-322 SM). Mereka mengecam bangsa Romawi yang mempraktikkan sistem bunga, karena dua alasan. *Pertama*, bunga

			rupanya telah mengakibatkan kesengsaraan atau kezaliman (<i>dzulm</i>) bagi si miskin. Jika tidak ada unsur kedzaliman maka itu buka riba	
05	Prof. Dr. KH. Sahid, HM, M.Ag.	Balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menjual atau membeli produknya.	*Halal apabila bunga bank itu digunakan atau menghasilkan hal-hal yang bersifat produktif, dibuat modal usaha sehingga mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut dan tidak ada pihak yang dirugikan. * Haram jika bunga bank itu digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, misalnya meminjamkan uang satu juta kepada seseorang, namun harus mengembalikan 1.5 juta secara kredit atau tempo tertentu.	Antara halal dan haram
06	Dr. KH. Nasiri, M.HI.	Bunga merupakan penyebab utama terjadinya krisis ekonomi, bunga merupakan alat yang dibayar sebagai peminjaman modal	Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an tentang tahapan pelarangan riba seperti disebutkan di atas bahwa Islam ingin memberantas praktik riba (bunga). Sebab di dalam praktik riba khususnya yang terjadi di dalam perbankan konvensional itu terdapat unsur	Haram

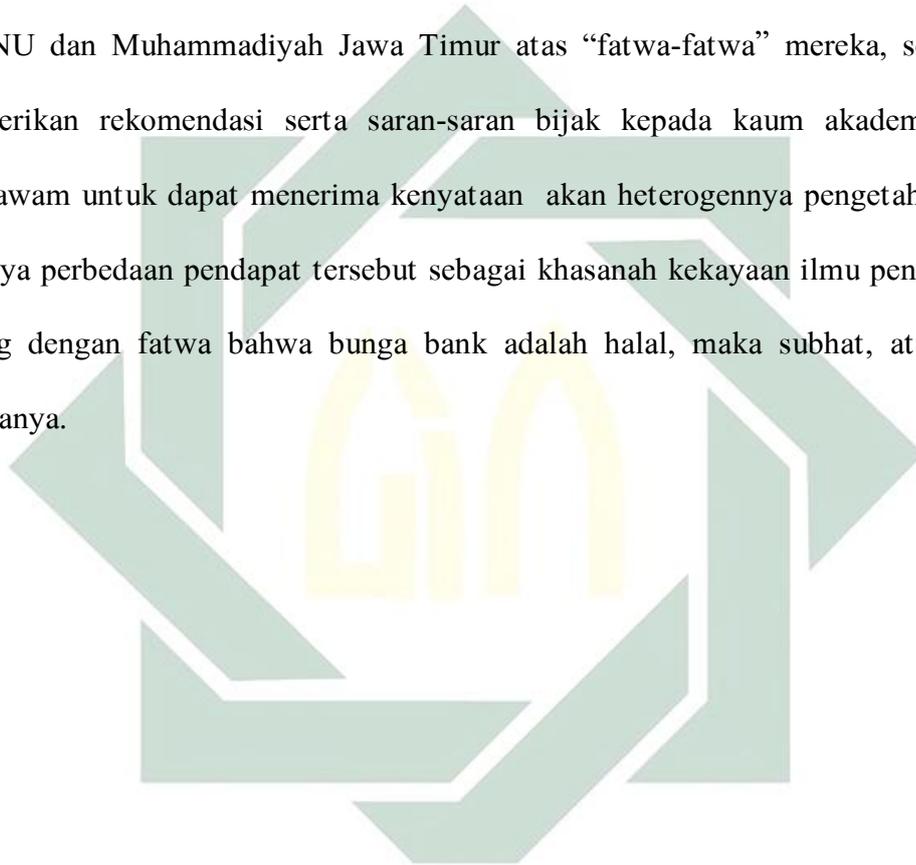
			dhārar (merugikan orang lain) padahal dalam mua'malah tidak boleh ada ghārar (tipu-tipuan) dan dhārar,	
07	Pror. Dr. H. Ali Mufrodi, MA.	Bunga bank dihadapkan dalam kriteria riba, tetapi di pihak lain, bank mempunyai fungsi sosial	Selagi belum ada bank Islam, maka dibolehkan bermuamalah dengan bank konvensional. Oleh karena sudah ada bank yang bersistem syari'ah maka seharusnya umat Islam menggunakan bank syari'ah	Haram
08	Dr. H. Saad Ibrahim, MA.	Bunga menunjuk makna tambahan, maka hal itu tidak ada bedanya dengan bunga bank, yang berarti hukumnya sama-sama haram. Pemikiran kedua, dibangun atas alasan bahwa sekalipun antara riba dan bunga bank itu sama-sama di dalamnya terdapat tambahan atas pokok pinjaman, tetapi keduanya berada dalam kontek sosioekonomis yang berbeda, sehingga hukumnya juga berbeda	Metode istihsan, yaitu itu dua hal yang mirip, <i>liwajhin aqwa</i> , dengan alasan yang lebih kuat, yaitu terjadi inflasi, atau termasuk juga pihak bank sebagai mediator.	Halal

09	Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag.	Persoalan bunga bank dalam pembahasan ulama fiqh klasik tidak dijumpai pembahasan tentang kaitan antara bunga bank dengan riba, karena sistem perekonomian dengan bank belum dikenal di zaman mereka. Pembahasan bunga bank apakah termasuk bunga atau tidak baru ditemukan dalam berbagai literatur fiqh kontemporer.	Selama bunga itu tidak “mencekik”, tidak mendatangkan kedholiman, kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan maka bunga bank itu tidak haram (halal), akan tetapi jika dengan bunga itu ada pihak yang dirugikan maka hukumnya haram.	Antara halal dan haram
10	Dr. H. Nur Hakim, MA.	Tambahannya harta yang sama dengan riba	*Keputusan Majelis Tarjih yang telah mengharamkan bunga bank * QS. Ali Imran: 130, QS. Al-Baqarah 275-279. QS. An-Nisa’ 160-161.	Haram
11	Drs. H. Mukarram, M.Hum.	Bunga bank tidak dapat dipersamakan dengan riba	Merujuk pada perkembangan pemikiran terhadap masalah bunga (“riba”) ini yang terjadi di masa klasik, ketika pada 1903, di Mesir, orang mempersoalkan bunga Tabungan Pos. Kontroversi tentang hukumnya pun merebak. Tetapi Mahmud Syaltut (1893-	Halal

			1963), seorang ulama besar, tampil dengan menegaskan bahwa bunga Tabungan Pos tersebut halal.	
12	Dr. Muhammad Nafik H.R. ST, SE, MM.	Tambahan atau kelebihan, meskipun sedikit, atas jumlah pokok yang dipinjamkan	* Bunga bank adalah kanker yang dapat menghancurkan perekonomian * QS. Ar-Rum: 39, Qs. An-Nisa': 160-161, Q.S. Ali Imran: 130, QS. Al-Baqarah: 275-279.	Haram

Berdasarkan tabel tipologi pemikiran para intelektual di atas, penulis menganalisa dan menyimpulkan bahwa: *Pertama*, sebagian intelektual NU Jawa Timur menganggap bahwa bunga bank adalah mubah dengan berbagai alasan dan landasan atas konstruksi fikihnya, ada yang menganggapnya subhat, tetapi sebagian yang lain justru mengharamkannya selaras dengan fatwa MUI. Demikian halnya, para tokoh intelektual Muhammadiyah, mayoritas memiliki pandangan yang sama dengan persyarikatan PP Muhammadiyah yang telah mengharamkan bunga bank, namun uniknya masih ada tokoh intelektual Muhammadiyah Jawa Timur yang “tidak taat” terhadap penetapan hukum organisasinya dengan “berfatwa” bahwa bunga bank adalah mubah (halal) dengan berbagai argumentasi ilmiahnya. Beragamnya pendapat para tokoh intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur tentang acuan dasar hukum terkait ijtihad fikihnya atas bunga bank. *Kedua*: Para ulama yang menganggap halal akan bunga bank dengan argumentasi akademik bahwa bunga bank tidak dapat dipersamakan dengan riba, karena tidak ada unsur kedholiman, bersifat produktif atau sama-sama diuntungkan.

Sementara para tokoh intelektual -baik NU atau Muhammadiyah- yang menganggap bunga bank adalah haram dengan alasan bahwa bunga “sama sekalipun tidak serupa” dengan riba. Secara ekonomi, bunga dapat menimbulkan inflasi ekonomi, sebagai akibat dari bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. *Ketiga*, sebagai akibat hukum yang timbul dari pandangan intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur atas “fatwa-fatwa” mereka, setidaknya telah memberikan rekomendasi serta saran-saran bijak kepada kaum akademisi dan masyarakat awam untuk dapat menerima kenyataan akan heterogenya pengetahuan serta menjadikannya perbedaan pendapat tersebut sebagai khasanah kekayaan ilmu pengetahuan, jika bimbang dengan fatwa bahwa bunga bank adalah halal, maka subhat, atau haram sebagai pilihannya.



masalah, metode yang jika tidak ada unsur kedzaliman maka bukan riba, jika bersifat produktif dan saling menguntungkan maka bukan riba, hingga metode *istinbāt* yang mengacu pada tahapan-tahapan pelarangan riba dalam al-Qur'an bahwa Islam ingin memberantas praktik riba (bunga). Demikian pula metode *istinbāt* hukum bunga menurut para intelektual Muhammadiyah Jawa Timur, antara lain: metode *istihsan*, yaitu dua hal yang mirip, *liwajhin aqwa*, dengan alasan yang lebih kuat, yaitu terjadinya inflasi dan pihak bank sebagai mediator, metode alternatif, yaitu seharusnya umat Islam menggunakan bank muamalah, metode yang saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak, serta metode menyamakan konsep bunga dengan sistem riba, hingga metode *istinbāt* yang menganggap bunga laksana kanker yang dapat menghancurkan perekonomian.

3. Akibat hukum yang timbul dari pandangan intelektual NU Jawa Timur adalah bahwa sebagian intelektual NU Jawa Timur berpendapat bunga bank adalah mubah (halal), ada yang berfatwa subhat, sedangkan sebagian yang lain mengharamkannya. Mayoritas intelektual Muhammadiyah berpandangan sama dengan persyarikatan PP Muhammadiyah yang telah mengharamkan bunga bank, namun uniknya masih ada intelektual Muhammadiyah Jawa Timur yang "tidak taat" terhadap penetapan hukum organisasinya dengan berfatwa bahwa bunga bank adalah mubah (halal) dengan berbagai argumentasi ilmiahnya. Fatwa-fatwa mereka setidaknya telah memberikan rekomendasi serta saran-saran bijak kepada kaum akademisi dan masyarakat awam untuk dapat menerima kenyataan akan heterogenya pengetahuan serta menjadikannya perbedaan pendapat tersebut sebagai khasanah kekayaan ilmu pengetahuan, jika bimbang dengan fatwa bahwa bunga bank adalah halal, subhat (antara halal dan haram), maka haramlah sebagai pilihan hukum selanjutnya.

